

KAJIAN DESKRIPTIF TUGAS POKOK DAN FUNGSI TPMPD DI WILAYAH JAWA BARAT

LAPORAN PENELITIAN

Diajukan kepada
Kepala LPMP Jawa Barat untuk Memenuhi
Salah Satu Tugas Widyaiswara pada Unsur Pengembangan Profesi



Ketua : Dr. Asep Zuhara Argawinata.,M.I.Kom.

Anggota : Dr. Wawan., M.T.
Rika Surya., M.Pd.
Sugeng Budi., M.Pd.
Hary Tjahjono., M.T.
Nana Karyana., M.Pd.
Mukhamad Arif Baehaqi.,M.M.Pd.
Rakhmat AF.,M.Pd.
Evi Dihanti.,M.Pd.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN DESKRIPTIF TUPOKSI DAN WEWENANG TPMPD DI WILAYAH JAWA BARAT

Mengetahui
Kepala LPMP Jawa Barat

Bandung Barat, Desember 2019

Pembimbing

Gusmayadi Muhamarsyah, M.Ed
NIP. 196405261995121001

Prof. Ace Suryadi, M.Pd
NIP. 195107251978031001

Kajian Deskriptif Tugas pokok dan Fungsi TPMPD di Wilayah Propinsi Jawa Barat

Asep Zuhara Argawinata, Wawan, Sugeng Budi Setiono, Rika Surya, Hari Tjahjono, Nana Karyana, Mukhamad Arif Baehaqi, Rahmat Abdul Fatah., Evi Dihanti.
LPMP Jawa Barat, 2019

ABSTRAK

Kajian dalam penelitian ini adalah, Kajian deskriptif Tugas pokok dan fungsi TPMPD di wilayah propinsi Jawa Barat, yang di fokuskan pada kondisi objektif profil TPMPD dilihat dari aspek Latar belakang pendidikan dan jabatan TPMPD serta konsistensi TPMPD dalam mengikuti IN-1 dan IN-2 dan kondisi objektif pemahaman TPMPD terkait tugas pokok TPMPD, fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD dan fungsi fasilitasi oleh TPMPD. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan responden pengurus TPMPD di wilayah propinsi Jawa barat. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kajian deskriptif Tugas pokok dan fungsi TPMPD dilihat dari Profil dengan katagori Baik, Tugas pokok, Fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi secara umum menunjukkan hasil 45,03% dengan katagori kurang, adapun secara khusus hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu : Profil pengurus TPMPD mayoritas berkualifikasi S2 sebanyak 75% dengan katagori Baik, Jabatan pengurus TPMPD mayoritas pengawas sebanyak 61,5% dengan katagori Cukup, Tingkat konsistensi pengurus TPMPD dalam mengikuti Bimtek sebanyak 37,5% dengan katagori kurang. Pemahaman tugas pokok dan fungsi TPMPD sebanyak 45,6% dengan katagori Kurang, untuk fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD diperoleh hasil sebanyak 46% dengan katagori Kurang serta untuk fungsi Fasilitasi mutu pendidikan oleh TPMPD diperoleh hasil sebanyak 44,5% dengan katagori Kurang

Kata Kunci : TPMPD, Tugas Pokok, Fungsi Pemetaan Mutu, Fungsi Fasilitasi

ABSTRACT

Descriptive study of the main tasks and functions of TPMPD in the province of West Java

Asep Zuhara Argawinata, Wawan, Sugeng Budi Setiono, Rika Surya, Hari Tjahjono, Nana Karyana, Mukhamad Arif baehaqi, Rahmat AF., Evi Dihanti.
LPMP Jawa Barat, 2019

The study in this research is, Descriptive Study of the main tasks and functions of TPMPD in the area of West Java province, which is focused on the objective conditions of the TPMPD profile viewed from aspects of the educational background and position of the TPMPD and the consistency of the TPMPD in following IN-1 and IN-2 and the conditions objective understanding of TPMPD related to the main tasks of TPMPD, the function of quality mapping by TPMPD and the facilitation function by TPMPD. The research method uses descriptive quantitative approach, with TPMPD management respondents in the area of West Java province. With the results of the study it can be concluded that the descriptive study of the main tasks and functions of TPMPD seen from the Profile with Good categories, Main tasks, Quality mapping function and facilitation functions generally show results of 45.03% with less categories, while specifically the results of the research can be concluded as follows namely: Profile of the majority of TPMPD management who are S2 qualified as much as 75% with Good category, TPMPD management positions are majority of supervisors as much as 61.5% with Sufficient categories, The level of consistency of TPMPD administrators in joining Bimtek is 37.5% with less categories. Understanding of the main tasks and functions of TPMPD as much as 45.6% with Less categories, for the quality mapping function by TPMPD 46% results were obtained with Less categories and for the Facilitation function of educational quality by TPMPD results were as much as 44.5% with Less categories

Keywords: TPMPD, Main Task, Quality Mapping Function, Facilitation Function

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas nama Tim Peneliti LPMP Jawa Barat panjatkan ke hadirat Alloh SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan rangkaian program sebagaimana tertuang dalam DIPA LPMP Jawa Barat Tahun 2019 dalam upaya pengembangan profesi sekaligus sebagai bahan evaluasi atas program inti LPMP Jawa Barat di Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis atas nama Tim Peneliti LPMP Jawa Barat menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. **Gusmayadi Muhamarsyah, M.Ed**, selaku Kepala LPMP Jawa Barat yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga terlaksananya penelitian ini;
2. **Prof. Ace Suryadi, M. Pd**, selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan masukannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar;
3. **Bapak/Ibu responden** yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena sampelnya cukup banyak, atas partisipasi dan kerja samanya yang baik sehingga diperoleh data-data yang sangat berguna untuk penyusunan laporan penelitian ini.
4. **Rekan-rekan peneliti** yang dengan penuh kesabaran dan keuletan dalam menjalankan penelitiannya sehingga tercipta kerja sama yang baik.

Akhirnya penulis atas nama Tim Peneliti LPMP Jawa Barat berharap semoga segala bentuk bantuan dan budi baik semuanya mendapat balasan dari Alloh SWT., dan mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di

Propinsi Jawa Barat khususnya dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Bandung Barat, Januari 2020

Tim Peneliti LPMP Jawa Barat

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan (TPMPD).....	8
C. Pengertian Analisis Jabatan.....	17
D. Prinsip Analisis Jabatan.....	18
E. Komponen Analisis Jabatan.....	18
F. Metode Analisis Jabatan.....	20
G. Tujuan Analisis Jabatan.....	21
H. Asumsi Peneliti.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Paradigma Penelitian.....	24
B. Subjek dan Lokasi Penelitian.....	24
C. Instrumen Penelitian.....	26
D. Jenis Alat Pengumpul Data yang Digunakan.....	26
1. Wawancara.....	27
2. Observasi.....	28

3. Studi Dokumentasi	29
4. Angket	31
E. Indikator Keberhasilan	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Profil TPMPD	32
1. Jenjang Pendidikan.....	32
2. Jabatan	33
3. Konsistensi TPMPD	34
B. Analisis Data	35
1. Pemahaman Tugas Pokok TPMPD	35
2. Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD.....	37
3. Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD	39
C. Pembahasan	41
1. Profil TPMPD	41
2. Pemahaman Tugas Pokok TPMPD	42
3. Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD.....	43
4. Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD	43
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
A. Kesimpulan	45
B. Rekomendasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Penyebaran Subjek Penelitian	25
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen	26
Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan.....	31
Tabel 4.1 Jenjang Pendidikan.....	32
Tabel 4.2 Jabatan TPMPD.....	33
Tabel 4.3 Konsistensi TPMPD	34

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Persentasi Pemahaman Tugas Pokok TPMPD.....	36
Grafik 4.2 Persentasi Fungsi Pemetaan Mutu TPMPD.....	38
Grafik 4.3 Persentasi Fungsi Fasilitas TPMPD	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan) mempunyai tugas fasilitasi dan pemetaan mutu serta membantu pemerintah daerah dalam menerapkan SPME-Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TPMPD terdiri atas Dinas Pendidikan, Pengawas dan Dewan Pendidikan. TPMPD perlu memahami pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) oleh Pemerintah daerah, memahami konsep SPMI dan SPME, melakukan pemetaan mutu pendidikan, melakukan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan di daerah.

Iklim organisasi, pemberdayaan, pembinaan dan kepemimpinan memengaruhi kinerja TPMPD serta berdampak pada keberhasilan Implementasi SPME di daerah.

Pembentukan TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah) dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tugas TPMPD : Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI, memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di daerah, dan menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah.

Pada kenyataannya TPMPD belum efektif dalam melaksanakan tugasnya membantu pemerintah daerah dalam melakukan penjaminan mutu eksternal, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap ketidak berhasilan implementasi pemetaan mutu dan fasilitasi SPME di daerah.

Pada Penelitian ini diangkat judul penelitian “ Kajian Deskriptif Tupoksi dan Wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan (TPMPD) di wilayah Jawa Barat.

Dari latar belakang masalah tersebut Tugas TPMPD merupakan salah satu elemen penting dalam pemetaan mutu dan fasilitasi organisasi. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu.

Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan. Setiap anggota organisasi TPMPD memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas.

Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Pada organisasi pemerintah, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkungannya menjadi organisasi pemerintahan daerah, Tugas Pokok dan Fungsi TPMPD Daerah secara umum diatur dalam Permendikbud No.28 tahun 2016.

Rencana Strategis (Renstra-TPMPD) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Manajemen kepegawaian yang merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewajiban kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi organisasi sangat berkaitan erat dengan efektivitas kerja organisasi. Keefektifan sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauhmana sebuah organisasi tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Seperti kita

ketahui bahwa sebuah organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi juga termasuk didalamnya sangat tergantung pada sejauhmana sumber daya manusia di dalamnya mempunyai pemahaman tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pekerjaannya serta efektif tidaknya individu dan kelompok tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya sinergi antara efektivitas individu dan kelompok maka organisasi akan memperoleh tingkat efektivitas yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi yang ada dalam organisasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas individu maupun kelompok. Efektivitas individu diwujudkan berdasarkan sejauh mana individu atau TPMPD tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar dan konsisten. Oleh karena itu, agar tercipta tugas pokok dan fungsi untuk para TPMPD yang tepat demi tercapainya tujuan organisasi, maka perlu memanfaatkan konsep perancangan atau desain pekerjaan yang baik dan benar. Tugas pokok dan fungsi TPMPD yang telah dirancang dengan benar tersebut secara jelas termuat dalam sebuah uraian pekerjaan (*Job Description*). Uraian Pekerjaan (*Job Description*) dalam sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah merupakan kumpulan informasi mengenai pekerjaan atau garis besar mengenai apa saja kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang dipegang serta harus dilaksanakan oleh para pegawai. Selain itu, uraian pekerjaan juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan tugas-tugas tersebut demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan di atas, uraian pekerjaan yang memuat tugas pokok dan fungsi untuk para TPMPD tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam organisasi sehingga harus disusun secara jelas dan terarah.

Hal tersebut dikarenakan meskipun perancangan pekerjaan telah dilakukan dengan benar, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak ditetapkan secara jelas sebagai pedoman kerja

pegawai, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut akan tidak optimal dan konsisten. Pekerjaan yang telah dibuat akan tidak memiliki konsistensi mengenai siapa sebenarnya TPMPD yang tepat sebagai pelaksana tugas tersebut, tidak adanya pemahaman TPMPD mengenai prosedur pelaksanaan tugas, serta apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Agar uraian pekerjaan menjadi jelas dan dapat dipahami oleh setiap pegawai, uraian pekerjaan tersebut harus mempertimbangkan beberapa unsur yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan.

Adapun informasi-informasi yang termuat dalam Permendikbud No.28 tahun 2019 antara lain nama jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan, uraian pekerjaan, yang mana di dalamnya tersebut dapat menjelaskan informasi-informasi pekerjaan tersebut dengan tepat maka akan menghasilkan suatu uraian pekerjaan yang jelas sehingga membuat para TPMPD dapat memahami tugas-tugasnya dengan baik, tidak mengalami banyak hambatan kerja sebab tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, tiap-tiap TPMPD juga memiliki batasan kerjanya tersendiri sehingga tidak dapat saling mencampuri tugas satu sama lain, tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas organisasi, serta komunikasi yang terbentuk dengan baik karena adanya hubungan kerjasama yang baik antar pegawai.

Namun, untuk memenuhi elemen-elemen dalam uraian pekerjaan tersebut, diperlukan informasi-informasi yang adadalam organisasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penyusunan uraian pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan informasi melalui analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi. Dengan adanya informasi yang diperoleh melalui analisis pekerjaan tersebut, kemudian diolah dengan tepat menjadi sebuah desain pekerjaan yang kemudian dapat dicantumkan secara jelas di dalam uraian pekerjaan bersama dengan persyaratan pekerjaan.

Dapat diketahui bersama bahwa pada umumnya hasil kerja TPMPD pemerintahan saat ini kurang memberikan hasil yang optimal terhadap kepentingan sekolah maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasinya atau dapat dikatakan kurang memuaskan. Adapun fenomena yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian kinerja TPMPD tersebut anggota TPMPD kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, dimana masih banyak anggota tim TPMPD yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya karena ketidakpahaman terhadap tugas-tugasnya sebagai TPMPD pemerintah dengan baik, aktivitas kerja TPMPD yang tidak merata, rendahnya disiplin kerja TPMPD serta penempatan TPMPD yang tidak sesuai dengan fungsi dan keahliannya, yang mencerminkan kurang jelasnya deskripsi pekerjaan serta rendahnya performa yang dimiliki pegawai.

Oleh karena permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini fokus untuk melihat profil TPMPD dari tiga sisi yaitu tingkat pendidikan, jabatan dan konsistensi peserta kabupaten kota dan KCD dalam mengikuti kegiatan IN-1 dan IN-2 serta pengaruhnya terhadap tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut : “Kajian Deskriptif Tupoksi dan Wewenang TPMPD di wilayah Jawa Barat”.

Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penguraian tugas pokok dan fungsi yang dijalankan TPMPD berdasarkan pembagiannya kelompoknya, bagaimana pelaksanaan Tupoksi TPMPD oleh anggota tersebut, serta hal-hal yang terkait dalam pelaksanaannya baik itu mengenai hal-hal pendukung, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan TUPOKSI tersebut, yang secara tidak langsung dapat mencerminkan bagaimana konsistensi dari tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh TPMPD dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Permasalahan berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu mengapa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) oleh TPMPD belum dipahami secara

menyeluruh belum dilaksanakan secara konsisten, Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) TPMPD belum dilaksanakan secara konsisten.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan peran TPMPD mengenai deskripsi pekerjaan atau pembagian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam lingkup pemerintahan. Dan kegunaan Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung sebagai salah satu sumber penyempurnaan dalam deskripsi pekerjaan atau penguraian tugas pokok dan fungsi guna peningkatan efektivitas kerja TPMPD dalam lingkup pemerintahan

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini di fokuskan pada kajian Deskriptif tugas pokok dan fungsi TPMPD di wilayah Propinsi Jawa Barat.

2. Perumusan Masalah

Beradasrkan identifikasi Masalah diatas dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi objektif profil TPMPD dilihat dari aspek Latar belakang pendidikan dan jabatan TPMPD serta konsistensi TPMPD dalam mengikuti IN-1 dan IN-2 ?
2. Bagaimana kondisi objektif pemahaman TPMPD terkait tugas pokok TPMPD, fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD dan fungsi fasilitasi oleh TPMPD ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dilakukan mampu mengkaji, menjelaskan dan memperoleh jawaban tentang :

1. Kondisi objektif profil TPMPD dilihat dari aspek Latar belakang pendidikan dan jabatan TPMPD serta konsistensi TPMPD dalam mengikuti IN-1 dan IN-2
2. Kondisi objektif pemahaman TPMPD terkait tugas pokok TPMPD, fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi oleh TPMPD

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan terhadap TPMPD dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penjaminan mutu eksternal.
2. Memberikan tambahan kontribusi informasi kepada peneliti dibidang penjaminan mutu khususnya mengenai pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi TPMPD Pemerintah Daerah
3. Memberikan tambahan kontribusi informasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Daerah tentang Panjaminan Mutu Eksternal dan Kinerja TPMPD.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi LPMP yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di wilayah binaan masing-masing dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ke sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)

Dalam hal ini Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) merupakan salah satu organisasi yang melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah yang secara langsung bersinergi dengan LPMP Jawa barat dalam melaksanakan tugas tersebut, selain menjalankan fungsi 7 pelaksanaan urusan administrasi, LPMP menyelenggarakan fungsi : 1). Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 2). Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3). Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; 4). Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan ;

5). Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan. Pembagian Tugas Lembaga Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian tugas sebagai berikut.

Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya adalah :

1). Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen; 2). Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI-Dikdasmen; 3). Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 4). Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; 5). Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; 6). Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Pemerintah Provinsi Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan diantaranya yaitu : 1). Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 2). Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 8 kolaborasi penjaminan mutu pendidikan Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD. ; 3). Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; 4). Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya; dan 5). Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan

mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (TPMP Provinsi). Pemerintah Kabupaten/Kota Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan diantaranya ;

- 1).Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- 2). Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- 3). Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- 4). Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- 5). Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan

Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota (TPMP Kabupaten/Kota).

Sinergitas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dengan pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah: 1). Pemetaan mutu di satuan pendidikan, 2). Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan ke sekolah, 3). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan hingga terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan . Dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah oleh TPMPD dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal semua proses

dan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal dengan pembagian tugas yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi TPMPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM), langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pendataan mutu dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan. Melalui tahap pengelolaan data mutu, data mutu yang dihasilkan diolah menjadi peta mutu. Berdasarkan pemetaan mutu disusun Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan lain sebagai awal dari pengembangan kerja sama untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah.

Kolaborasi penjaminan mutu pendidikan Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD Diagram Alur Tugas Pemerintah Daerah (TPMPD) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Dinas Pendidikan. TPMPD diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (*ex-officio*) dengan anggota dari Dinas Pendidikan (Bidang-bidang), Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK/Perguruan Tinggi, dan Koordinator Pengawas. Bagi TPMPD Provinsi diharapkan ada anggota dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tugas utama TPMPD sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan meliputi : (1) Pemetaan Mutu Pendidikan, (2) Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, (3) Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu di Daerah, (4) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, (5) Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya, (6) Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain, dan (7) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah, (8) Kebutuhan Kompetensi SDM Dalam Pelaksanaan SPMPDM oleh Pemerintah Daerah, dan (9) Roadmap Sekolah Budaya Mutu (1) Pemetaan Mutu Pendidikan Pelaksanaan

pembangunan pendidikan khususnya dalam pemenuhan mutu pendidikan baik di pusat maupun di daerah harus disusun berdasarkan fakta yang terjadi di sekolah. Sebagai penanggung jawab urusan wajib pendidikan di daerah, 11 pemerintah daerah harus memiliki data mutu pendidikan. Namun demikian hampir seluruh daerah Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyediakan data mutu pendidikan sehingga intervensi yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan sering kali tidak dilakukan berbasis data mutu yang akurat. Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai sumber data mutu baik di pusat ,maupun di sekolah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat dimulai di satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data mutu wilayah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data mutu di satuan pendidikan. Pengumpulan data mutu pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan kepada pengawas bersama data pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan instrumen pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi beserta data pendukungnya. Setelah data terkumpul, pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Data dan informasi tambahan spesifik wilayah adalah data lain selain data pendidikan yang erat kaitannya dengan pendidikan seperti demografi, geografi, infrastruktur daerah, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Data mutu Wilayah terdiri atas data mutu kabupaten/kota dan data

mutu provinsi. Berdasarkan data mutu wilayah, pengelolaan data mutu, kemudian dikembangkan peta mutu. Dengan adanya peta mutu, dapat disusun rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah. Mekanisme pengumpulan data dan manajemen data hingga tersusunnya peta mutu dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Kolaborasi penjaminan mutu pendidikan Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD merupakan bagian dari skema Pemetaan Mutu Pendidikan di daerah selain itu dalam kolaborasi tersebut perlu disusun Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah sebagai landasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Daerah diawali dengan persiapan dan diakhiri dengan diseminasi Rencana Strategis PMP Daerah dibuat dengan diagram Alur Penyusunan Renstra Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, sebagaimana lazimnya penyusunan Rencana Strategis, langkah awal yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data dan informasi kondisi lingkungan di daerah masing-masing.

Berdasarkan data dan informasi kondisi lingkungan pendidikan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan, kemudian dirumuskan isu-isu strategis masalah mutu pendidikan. Selanjutnya dirumuskan visi dan misi penjaminan mutu pendidikan, tujuan, dan sasaran peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan rumusan sasaran dan tujuan kemudian dirumuskan Strategi dan Kebijakan, Program Kerja, dan Indikator Kinerja. Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah masing-masing diuji publik guna mendapat masukan dan koreksi dari pemangku kepentingan hingga akhirnya diperoleh Rancangan Akhir Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Renstra tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Pimpinan Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) untuk kemudian didiseminasikan ke

masyarakat dan pemangku pendidikan di daerah masing-masing. Teknik penyusunan Rencana Strategis Penjaminan Mutu Pendidikan hampir sama dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra SKPD/OPD) di masing-masing daerah.

Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah berujuan agar Implementasi penjaminan mutu pendidikan lebih terarah, selain itu pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) juga sangat penting, karena keberadaan TPMPD juga ditegaskan pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kolaborasi penjaminan mutu pendidikan kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD Struktur Organisasi TPMPD didasarkan pada analisis kebutuhan yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal yang penting dalam pengembangan organisasi TPMPD adalah pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah yang mampu melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan ke sekolah dalam hal pengembangan sekolah model dan fasilitasi penerapan SPMI di semua sekolah, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Fasilitasi merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya implementasi SPMI di seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Guna menjamin terlaksananya fasilitasi yang efektif ke satuan pendidikan diperlukan infrastruktur dan SDM yang andal yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis yang tersedia.

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terdiri atas fasilitasi peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran yang berkaitan dengan 8 SNP. Peningkatan mutu manajemen sekolah meliputi Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

sementara itu Fasilitasi Peningkatan Mutu Pembelajaran meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Guna mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah, diperlukan SDM yang andal sesuai dengan tugas yang akan dilakukan pada setiap kegiatan penjaminan mutu pendidikan. SDM yang diperlukan adalah SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan penunjang. SDM tersebut juga harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan antara lain adalah SDM yang menguasai SNP, analisis data mutu pendidikan, perencanaan pendidikan, audit mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan (dalam konteks Kurikulum Nasional). SDM yang mampu melakukan kegiatan penunjang antara lain SDM yang mampu melaksanakan manajemen data (pengumpulan, verifikasi, dan validasi data), dan analisis data (peta mutu), mempersiapkan fasilitator, serta mampu melakukan koordinasi, sosialisasi, promosi, kerja sama, monitoring dan evaluasi, teknik pendampingan, dan pengelolaan pelatihan. Dalam hal ini SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dapat bertugas pada kegiatan penunjang bila memiliki kualifikasi di bidang tersebut.

Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan Pengembangan sekolah model ditujukan untuk mengembangkan percontohan sekolah yang menerapkan PMP secara mandiri. Sekolah model dikembangkan untuk memberikan gambaran langsung peningkatan mutu pendidikan kepada sekolah lain yang akan menerapkan PMP. Pengembangan sekolah model oleh pemerintah daerah dapat dilakukan apabila telah terbentuk TPMPD serta penyiapan infrastruktur dan penyiapan SDM.

Pengembangan Sekolah Model dan pengimbasannya dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya yaitu; 1) Seleksi dan penetapan sekolah model dan sekolah imbas, 2) Pelatihan SPMI untuk sekolah model dan sekolah imbas, 3) Implementasi SPMI di sekolah

model dan sekolah imbas. Pada tahap pelatihan dan tahap implementasi, dilakukan pendampingan oleh SDM yang terpilih. 4). Monitoring dan evaluasi sekolah model dan sekolah imbas oleh TPMPD. 5). Laporan pengembangan sekolah model dan sekolah imbas. Kolaborasi penjaminan mutu pendidikan Kajian Hasil Analisis Monev SPME-TPMPD 6). Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain Pelaksanaan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah akan lebih terarah apabila terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain, seperti DPRD, LPMP, LPTK, PT lain, Dewan Pendidikan, dunia industri/dunia usaha (DUDI), dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis dilakukan pemetaan tugas dan fungsi penjaminan mutu yang perlu bantuan atau perlu kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya dilakukan identifikasi lembaga yang akan diajak kerjasama. Agar kerjasama memiliki legalitas, dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah terjalin kerjasama, selanjutnya dilakukan implementasi kerjasama tersebut. Selama pelaksanaan kerjasama dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik. Berdasarkan hasil Monev dibuat Laporan Pelaksanaan PMP di daerah.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPME di Daerah Pelaksanaan penjaminan mutu di daerah perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Dengan demikian dapat diketahui hasil yang dicapai pada akhir setiap periode dan dilakukan revisi sasaran (peningkatan atau penurunan) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah Monitoring dan Evaluasi SPME oleh TPMPD di Daerah Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan Identifikasi Substansi Monev dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Monev. Setelah identifikasi, langkah kedua adalah penyusunan instrumen monev.

Selanjutnya dilakukan Penyusunan Rancangan Money, Penyiapan Instruktur dan SDM, Penyusunan Jadwal Money, dan Pelaksanaan Money. Money dilakukan dengan observasi, wawancara dan diskusi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung implementasi PMP dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Wawancara dapat dilakukan dengan metode in-depth interview, sedangkan diskusi dapat dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD). Monitoring dan evaluasi fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan pada akhir tahun anggaran. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kendala dan dampak dalam menerapkan SPMP. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPMP/ fasilitator daerah dengan melibatkan komponen yang telah ditentukan Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada LPMP untuk kemudian dikompilasi dan dianalisis oleh LPMP agar dapat dilaporkan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan strategi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ke depan yang lebih baik dan komprehensif.

C. Pengertian Analisis Jabatan

Manullang (1981:28) menjelaskan analisis jabatan merupakan suatu proses untuk membuat uraian jabatan sedemikian rupa, sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk dapat menilai jabatan itu guna suatu keperluan. Handoko (2001:32) menjelaskan analisis jabatan adalah suatu cara yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi pekerjaan/jabatan. Alwi (2001:108) menjelaskan bahwa analisis jabatan merupakan salah satu aktivitas penting dalam MSDM karena output dari Analisis Jabatan yang berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penentuan strategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, design, dan redesign jabatan, dan perencanaan SDM. Nawawi (2005:104) menjelaskan analisis jabatan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan yang berguna untuk mewujudkan tujuan

bisnis suatu perusahaan. Mathis dan Jackson (2006:200) menjelaskan bahwa analisis jabatan adalah sebuah cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi, konteks, dan persyaratan manusiawi, pekerjaan tersebut. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu jabatan dari segi aktifitas tugasnya, prasyarat dan spesifikasinya untuk nantinya dapat menempatkan orang yang tepat, sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut.

D. Prinsip Analisis Jabatan

Prinsip-prinsip Analisis Jabatan Moekijat (1999:18) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam menganalisis jabatan, yaitu:

1. Analisis jabatan hendaknya memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Analisis jabatan tunggal hendaknya dapat memberikan fakta fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan.
3. Analisis jabatan hendaknya sering ditinjau kembali dan apabila perlu diperbaiki.
4. Analisis jabatan hendaknya dapat menunjukkan unsur-unsur jabatan mana yang paling penting diantara beberapa unsur jabatan dalam tiap jabatan.
5. Analisis jabatan hendaknya dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya.

E. Komponen Analisis Jabatan

Komponen-komponen Analisis Jabatan Alwi (2001:108) menjelaskan bahwa deskripsi dan spesifikasi jabatan, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan Analisis Jabatan, yaitu:

1. Deskripsi jabatan adalah ringkasan tertulis tentang tugas-tugas pokok yang melekat pada suatu jabatan.
2. Spesifikasi jabatan adalah uraian tentang kualifikasi kemampuan, keahlian, dan pengalaman personal yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang terutang dalam deskripsi jabatan. Sihotang (2007:59) menjelaskan terdapat tiga komponen dalam analisis jabatan, yaitu: 1) Deskripsi jabatan (*job description*), adalah persyaratan resmi dan terorganisir tentang kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaannya. 2) Spesifikasi jabatan (*job specification*) Menunjukkan standar manusianya, baik kualitas maupun persyaratan-persyaratan yang dipenuhi pemangku jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan cukup berhasil. 3) Standar kinerja pekerjaan (*performance standar*) adalah suatu penentuan tingkat kinerja jabatan yang diharapkan dari pemegang jabatan tersebut. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar kinerja jabatan adalah fakta dalam analisis jabatan.
3. Tahap-tahap dalam Proses Analisis Jabatan menurut Hasibuan (2005:30) menjelaskan bahwa proses dalam menganalisis jabatan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan, adalah penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatannya.
 - 2) Mengumpulkan informasi tentang latar belakang, adalah penganalisis harus mengumpulkan, mengkualifikasi data, dan meninjau informasi latar belakang.
 - 3). Menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis, adalah penganalisis harus memilih beberapa muwakal jabatan yang harus dianalisis.
 - 4) Mengumpulkan informasi analisis jabatan, Adalah penganalisis kemudian mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan.
 - 5) Meninjau

informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, Adalah analisis jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan.

6) Menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, Adalah penganalisis pekerjaan kemudian menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. 7) Meramalkan perkembangan perusahaan, adalah penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, apakah dikemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan.

F. Metode metode Analisis Jabatan

Metode-metode Analisis Jabatan Dessler (1997:93) menjelaskan bahwa terdapat empat metode dalam mengumpulkan informasi analisis jabatan, yaitu :1) Wawancara Ada tiga jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data Analisis Jabatan, yaitu: wawancara individual dengan masing-masing karyawan, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan wawancara penyelia dengan satu atau lebih penyelia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang di analisis. 2). Kuesioner Dengan cara meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah satu cara lain untuk memperoleh informasi analisis jabatan. 3). Observasi Yaitu dilakukan dengan mengobservasi karyawan saat bekerja selama satu siklus (daur) kerja lengkap. 4) Buku harian (*diary/logs*) Peserta Pendekatan lain adalah meminta karyawan membuat buku harian (*diary/logs*) atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan.

G. Tujuan Analisis Jabatan

Tujuan analisis jabatan berkenaan dengan kegunaan analisis jabatan/pekerjaan, Strauss, George (1991:9) menyatakan bahwa pengetahuan terperinci dan jelas mengenai tiap pekerjaan, adalah perlu untuk :

- 1) Mengetahui bagaimana merekrut tenaga kerja dan menyewa siapa.
- 2) Mengetahui harus membayar berapa karyawan pada satu pekerjaan, dibandingkan dengan mereka yang ada di pekerjaan lain (yakni, untuk evaluasi pekerjaan)
- 3) Merencanakan tenaga kenaikan pangkat.
- 4) Mengevaluasi keefektifan seleksi dan program pelatihan.

Memenuhi syarat-syarat pemerintah tentang pengupahan pekerjaan yang adil. Dari pekerjaan diatas dapatlah dikatakan bahwa tujuan analisis jabatan merupakan landasan atau pedoman pada perusahaan untuk penerimaan, penempatan, serta penentuan jumlah karyawan. Analisis jabatan digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan mutasi, promosi, dan pemberian latihan atau training kepada karyawan serta sebagai dasar pemberian kompensasi. Dengan demikian dapat memperbaiki kondisi lembaga yang selama ini dihadapi oleh organisasi dalam proses pelaksanaan analisis jabatan.

Deskripsi Jabatan dan Spesifikasi Jabatan. 1) Deskripsi Jabatan Moekijat (1998:98) deskripsi jabatan dapat samadengan laporan analisis jabatan, tetapi pada umumnya deskripsi jabatan itu merupakan suatu informasi yang abstrak dan yang diperoleh, dikupas dari laporan analisis jabatan. Moekijat (1998:100) menjelaskan, adapun data-data yang dicatat dalam deskripsi jabatan berhubungan dengan dua hal yang penting dari setiap jabatan, yaitu: a) Hakikat atau sifat jabatan yang bersangkutan Meliputi: nama jabatan, nama dan jumlah penggolongan, jumlah pegawai yang memangku jabatan tersebut, ikhtisar jabatan, uraian jabatan, uraian mengenai bahan/alat yang digunakan dalam jabatan, keterangan hubungan antara jabatan satu dengan yang lain, catatan tentang jabatan, pelatihan, jumlah dan jenis kompensasi, lamanya jam kerja, kondisi-kondisi kerja khusus dan sebagainya. Jenis pegawai yang sesuai untuk posisi jabatan tersebut. Meliputi: jenis kelamin, usia, syarat-syarat

badaniah khusus, ketangkasan badaniah, kemampuan rohaniah dan sebagainya. Sihotang (2007:66) menjelaskan tujuan dari deskripsi jabatan adalah:1) Menyediakan informasi organisasi 2) Menyediakan informasi structural 3) Informasi fungsional di dalam organisasi

Spesifikasi Jabatan Rivai (2004:126) menjelaskan spesifikasi jabatan (*job specification*) adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan. Secara lengkap spesifikasi jabatan dapat diartikan sebagai persyaratan pengetahuan, keterampilan atau keahlian, kemampuan mental dan fisik serta sifat-sifatkepribadian tertentu yang disyaratkan kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu secara fisik, efektif, efisien, dan produktif. Panduan yang dapat digunakan dalam memasukkan karakteristik-karakteristik yang harus dimasukkan pada suatu spesifikasi jabatan yaitu : 1) Semua tugas pekerjaan harus dikenali dan dinilai dalam kaitannya dengan arti penting teknik analisis jabatan; 2) Suatu panel tenaga ahli, karyawan atau para penyelia perlu menetapkan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk melakukan masing-masing tugas pekerjaan; 3) Tingkat keterampilan masing-masing harus di nilai; Karakteristik lain yang penting untuk melakukan pekerjaan itu harus dikenali, meliputi: kondisi fisik yang dibutuhkan dan sertifikasi profesional; 4) Jenis keterampilan yang telah dikenali perlu untuk secara rinci dikaitkan dengan masing-masing tugas pekerjaan. Beberapa ciri maupun keterampilan yang dinyatakan dalam kriteria pekerjaan harus aktual untuk memenuhi kinerja pekerjaan tersebut. Spesifikasi jabatan harus dapat membedakan dengan jelas antara keterampilan yang penting dan tidak penting. Keterampilan yang penting adalah keterampilan yang tidak dapat digantikan dengan yang lain untuk penyelesaian pekerjaan. Sedangkan keterampilan tidak penting dapat diakomodasikan dengan mengubah metode kerja atau struktur pekerjaan tersebut. Adapun tujuan dari spesifikasi jabatan adalah: 1) Karakteristik personel yang handal adalah untuk menentukan. 2) Untuk seleksi SDM. 3) Untuk penempatan pada jabatan yang tepat (Sihotang, 2007:67)

H. Asumsi Peneliti

Keberadaan TPMPD di Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu pemetaan mutu dan Fasilitasi peningkatan mutu di kabupaten kota belum optimal, faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi dari Kementerian Pendidikan melalui LPMP, padatnya kegiatan di kabupaten kota masing-masing. Serta kabupaten kota belum memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penjaminan mutu di kabupaten kota masing-masing, dikarenakan adanya kegiatan pendidikan yang lainnya.

Yang akan peneliti lihat adalah kelemahan TPMPD dalam memahami tupoksi dilihat dari dari aspek tingkat pendidikan, Jabatan dan konsistensi menghadiri kegiatan penjaminan mutu di LPMP Jawa Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kuantitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan berupa angka-angka dan narasi, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui tugas pokok, fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi TPMPD se-Jawa Barat, dengan harapan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh di Propinsi Jawa Barat.

B. Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPMPD di seluruh KCD dan dinas pendidikan kabupaten kota se-Jawa Barat selama 7 bulan yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan November 2019 sedangkan subjek penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Penyebaran Subjek Penelitian

No.	Kab/Kota	Jumlah Responden
1	Kabupaten Sukabumi	5
2	Kabupaten Cianjur	5
3	Kabupaten Bandung	5
4	Kabupaten Garut	5
5	Kabupaten Tasikmalaya	5
6	Kabupaten Ciamis	5
7	Kabupaten Kuningan	5
8	Kabupaten Cirebon	5
9	Kabupaten Majalengka	5
10	Kabupaten Sumedang	5
11	Kabupaten Indramayu	5
12	Kabupaten Subang	5
13	Kabupaten Purwakarta	5
14	Kabupaten Karawang	5
15	Kabupaten Bekasi	5
16	Kabupaten Bandung Barat	5
17	Kabupaten Pangandaran	5
18	Kota Bogor	5
19	Kota Sukabumi	5
20	Kota Bandung	5
21	Kota Cirebon	5
22	Kota Bekasi	5

23	Kota Depok	5
24	Kota Cimahi	5
25	Kota Tasikmalaya	5
26	Kota Banjar	5
27	Kabupaten Sukabumi	5
28	Cabang Dinas Wilayah I sd. XIII	58

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini meliputi tugas pokok, fungsi pemetaan mutu dan fasilitasi TPMPD

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen

No.	Indikator	Nomor item	Σ
1.	Tugas Pokok TPMPD	1,2,3	3
2.	Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	10
3.	Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD	14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25	11

D. Jenis Alat Pengumpul Data yang Digunakan

Dalam proses penelitian ini Tim peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa studi dokumentasi yang ada di LPMP Jawa Barat pasca Bimtek TPMPD, buku catatan lapangan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi. Selama proses penelitian berlangsung, beberapa kendala yang dihadapi Tim peneliti yaitu

diantaranya kesulitan mengatur kesesuaian waktu wawancara dengan informan yang ingin diwawancarai, karena pada saat tim peneliti akan melakukan penelitian bertepatan dengan padatnya kegiatan di LPMP Jawa Barat maupun Tim TPMPD yang ada di lapangan sebagai objek penelitian, sehingga jadwal wawancara yang telah disepakati ada yang harus diatur ulang kembali. hal ini dilakukan agar tim peneliti memiliki waktu yang memadai untuk melakukan wawancara sekaligus tidak mengganggu aktivitas informan penelitian.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang tim peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulandata adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. (Moleong,2007:241).

Dalam Penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui tiga sumber, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 19 234).

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari informan penelitian sebagai data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian, dimulai dari studi dokumen laporan hasil pasca Bimtek TPMPD, dan informasi dari anggota Tim TPMPD daerah, kemudian secara umum wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan informan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan

dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara (*guidlineinterview*) yang digunakan sebagai kontrol dalam alur pembicaraan.

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian tentang waktu yang dapat digunakan tim tim peneliti untuk melangsungkan wawancara. Hal ini dilakukan agar aktivitas informan tidak terganggu dan tim peneliti memiliki keleluasaan waktu untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

Wawancara diawali tim peneliti dengan membuka pembicaraan, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera didalam panduan wawancara. Tim peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pedoman wawancara sebagai tanggapan atas jawaban informan yang menurut Tim peneliti perlu dijelaskan lebih lanjut. Disamping itu Tim peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan yang telah diperoleh dari data dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sistematis mengenai objek yang ada di wilayah penelitian, dan kondisi-kondisi lingkungan lainnya di sekitar objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan tim tim peneliti untuk mengamati kinerja TPMPD. Observasi yang dilakukan tim peneliti adalah observasi non partisipan, yaitu tim peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan di KCD dan TPMPD di kabupaten kota di Jawa Barat, pada saat menunggu, tim peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anggota TPMPD. Pengamatan tidak hanya dilakukan tim peneliti

satu kali, dilain hari tim peneliti kembali datang ke TPMPD di daerah untuk melakukan observasi dengan lebih spesifik.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal, Pengamatan tidak hanya dilakukan tim peneliti satu kali, dilain hari tim peneliti kembali ke beberapa TPMPD di kabupaten kota untuk melakukan observasi dengan lebih spesifik. Dokumentasi Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal. Data internal yang diperoleh tim peneliti selama penelitian antara lain data yang berasal dari TPMPD di Kabupaten Kota di Jawa Barat, Selain itu, tim peneliti juga memperoleh data tentang Kegiatan yang dilakukan TPMPD, untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut tim peneliti meminta secara langsung kepada informan yang diwawancarai untuk menguatkan keterangan-keterangan yang informan sampaikan kepada tim peneliti, juga data didapatkan pada saat Pasca kegiatan Bimtek TPMPD, dan dokumen juga diberikan secara langsung oleh anggota Tim TPMPD di kabupaten/kota, ketika proses wawancara berlangsung baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Adapun dokumen eksternal yang dikumpulkan tim peneliti diantaranya adalah dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim TPMPD di Kab/kota. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut tim peneliti meminta secara langsung kepada seksi Pemetaan mutu dan supervise (PMS) sebagai *leading sector* pada kegiatan Bimtek TPMPD selain itu informan yang diwawancarai untuk menguatkan keterangan-keterangan yang informan

sampaikan kepada tim peneliti. Sebagian dokumen tersebut juga diberikan secara langsung oleh anggota.

Dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1998 : 405). Menurut Patton (dalam Moleong, 2007:280), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2007:280), analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi tersebut dapat pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan analisis deskriptif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap data-data, fakta-fakta, dan informasi-informasi yang diperoleh. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya akan diketahui pemahaman tugas pokok TPMPD, fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi TPMPD di propinsi Jawa Barat.

4. Angket

Angket untuk mengetahui pemahaman TPMPD tentang tugas pokok, fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban Ya dan Tidak

E. Indikator Keberhasilan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada penelitian ini, di gambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan

No.	Rentang Nilai	Predikat
1.	86 - 100	Amat baik
2.	71 - 85	Baik
3.	56 - 70	Cukup
4.	< 56	Kurang

Sumber : Analisis hasil Direktorat pembinaan tenaga kependidikan, Dikdasmen, GTK Kemdikbud, 2019

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Pembahasan tentang kajian deskriptif tentang tupoksi TPMPD di uraikan secara rinci tentang profil TPMPD, Analisis Datan dan Pembahasan terkait Profil TPMPD, fungsi pemetaan mutu dan fasilitasi oleh TPMPD.

A. Profil TPMPD

Profil TPMPD yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi jenjang pendidikan, jabatan dan keterlibatan dalam kegiatan di LPMP Jawa Barat.

1. Jenjang Pendidikan

Responden dari penelitian ini terdiri dari berbagai tingkat pendidikan seperti pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Peserta	Instansi			
	In 1		In 2	
	Instansi	%	Instansi	%
S3	12	6%	8	4%
S2	140	73%	155	77%
S1	38	20%	35	17%
D3	1	1%	1	0%
SMA/SMK	1	1%	2	1%
Jumlah	192	100%	201	100%

Dari tabel 4,1 menggambarkan responden TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2 terdiri dari jenjang S3 6 % di IN-1 dan 4% di IN-2, untuk jenjang S2 di IN-1 73% dan di IN-2 77%, untuk jenjang S1 di IN-1 20% dan di IN-2 17%, untuk jenjang D3 di IN-1 1%, dan di IN-2 0%, sedangkan di jenjang SMA/SMK di IN-1 1%, dan di IN-2 1%.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa TPMPD dengan jenjang S2 menunjukkan kenaikan sedangkan untuk jenjang lainnya mengalami penurunan, dari

data tersebut menunjukkan bahwa pengurus TPMPD sangat mumpuni sebagai pengurus hal ini diasumsikan dengan S2 ini dapat memahami tugas pokok dan fungsi TPMPD.

2. Jabatan

Terkait Jabatan pengurus TPMPD yang terlibat dalam kegiatan IN-1 dan IN-2 di peroleh data sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2. Jabatan TPMPD

Jabatan Peserta	Instansi			
	In 1		In 2	
	Instansi	%	Instansi	%
Dewan Pendidikan	4	2%	2	1%
Pejabat	53	28%	54	27%
Pengawas	117	61%	125	62%
Staf	18	9%	20	10%
Jumlah	192	100%	201	100%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jabatan peserta dari unsur : Dewan Pendidikan di IN-1 2%, dan di IN-2 1%, Unsur Pejabat di IN-1 28% dan di IN-2 27%, Unsur pengawas di IN-1 61% dan di IN-2 62 %, untuk unsur staf di IN-1 9% dan di IN-2 10%, dari data ini dapat digambarkan bahwa di asumsikan unsur dewan pendidikan dan pejabat tidak serius mengikuti kegiatan hal ini terlihat dari tingkat kehadiran, sedangkan dari unsur pengawas dan staf lebih banyak padahal seharusnya unsur pejabat dan dewan pendidikan harus tetap konsisten mengingat TPMPD sebagai pengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota.

Jabatan guru serta unsur manajemen sekolah mulai Dewan Pendidikan, Pejabat Dinas Pendidikan, 0,19 %, Pejabat, 26 %, Pengawas, 56,5 %, dan untuk Staf, 0,89%. Keterlibatan dalam kegiatan In service 1 dan Inservice 2 di LPMP Jawa Barat.

Sebagian besar TPMPD dari 27 kabupaten kota yang konsisten dalam mengikuti kegiatan In service 1 dan 2 di LPMP Jawa Barat, keterlibatannya 75,63%

3. Konsistensi TPMPD

Dalam penelitian ini digali terkait dengan konsistensi kehadiran, dan keutuhan pengurus TPMPD khususnya pada kegiatan IN-1 dan IN-2 diperoleh data sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3. Konsistensi TPMPD

Jumlah Peserta Konsisten	Instansi			
	Tetap		Berubah	
	Jumlah	%	Jumlah	%
0	1	2%	15	37%
1	1	2%	10	24%
2	7	17%	10	24%
3	7	17%	5	12%
4	9	22%	1	2%
5	16	39%	0	0%
Jumlah	41	100%	41	100%

Dari 41 TPMPD yang ada di provinsi Jawa Barat hanya 39% (16 TPMPD) mengirimkan orang yang sama sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2. 22% (9 TPMPD), ada masing-masing 4 peserta secara terus menerus mengikuti sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2, sedangkan 1 Orang tidak berkelanjutan mengikuti kegiatan Bimtek TPMPD IN-1 dan IN-2. 17% (7 TPMPD), ada masing-masing 3 peserta secara terus menerus mengikuti sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2, sedangkan 2 Orang tidak berkelanjutan mengikuti kegiatan Bimtek TPMPD IN-1 dan IN-2. 17% (7 TPMPD), ada masing-masing 2 peserta secara terus menerus mengikuti sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2,

sedangkan 3 Orang tidak berkelanjutan mengikuti kegiatan Bimtek TPMPD IN-1 dan IN-2. 2% (1 TPMPD), hanya ada 1 peserta yang secara terus menerus mengikuti sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2, sedangkan 4 Orang tidak berkelanjutan mengikuti kegiatan Bimtek TPMPD IN-1 dan IN-2. Terdapat 2% (1 TPMPD) yang mengirimkan peserta yang berbeda pada Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 maupun IN-2.

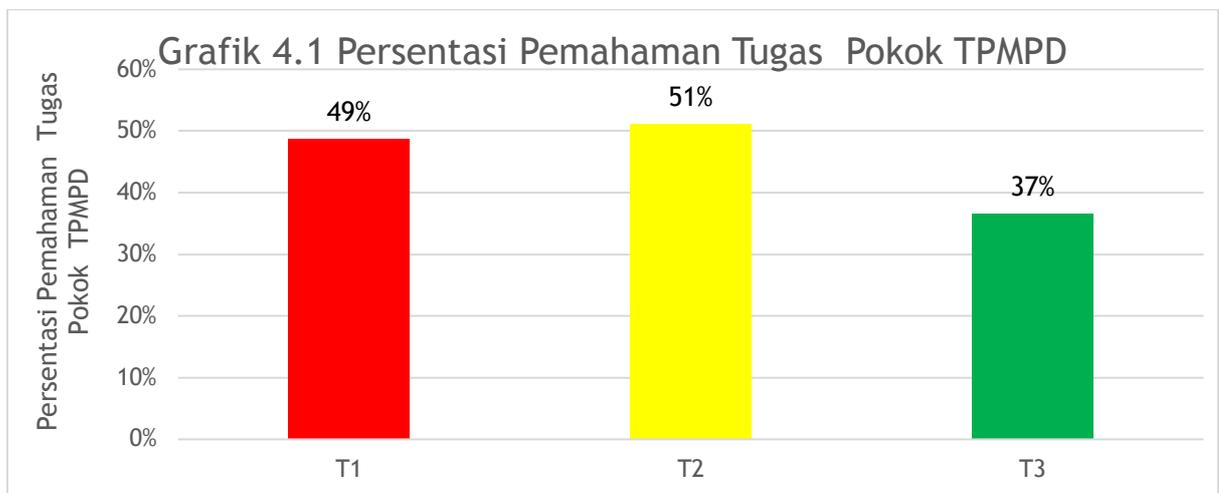
B. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini terkait dengan Pemahaman Tugas Pokok TPMPD, Fungsi Pemetaan Mutu Dn Fungsi fasilitasi oleh TPMPD

1. Pemahaman Tugas Pokok TPMPD

Tugas pokok TPMPD meliputi melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI, melakukan pemetaan mutu pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dan menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah kepada pimpinan wilayah masing-masing.

Terkait Tugas pokok TPMPD yang terlibat di peroleh data sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.1 dibawah ini.



Dari grafik 4.1 diatas dapat di jelaskan sebanyak 49% TPMPD di Jawa Barat melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI dan sisanya belum melakukan (T1), Sebanyak 51% TPMPD di Jawa Barat melakukan pemetaan mutu pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan (T2) dan sebanyak 37% TPMPD di Jawa Barat menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah propinsi Jawa Barat (T3) .

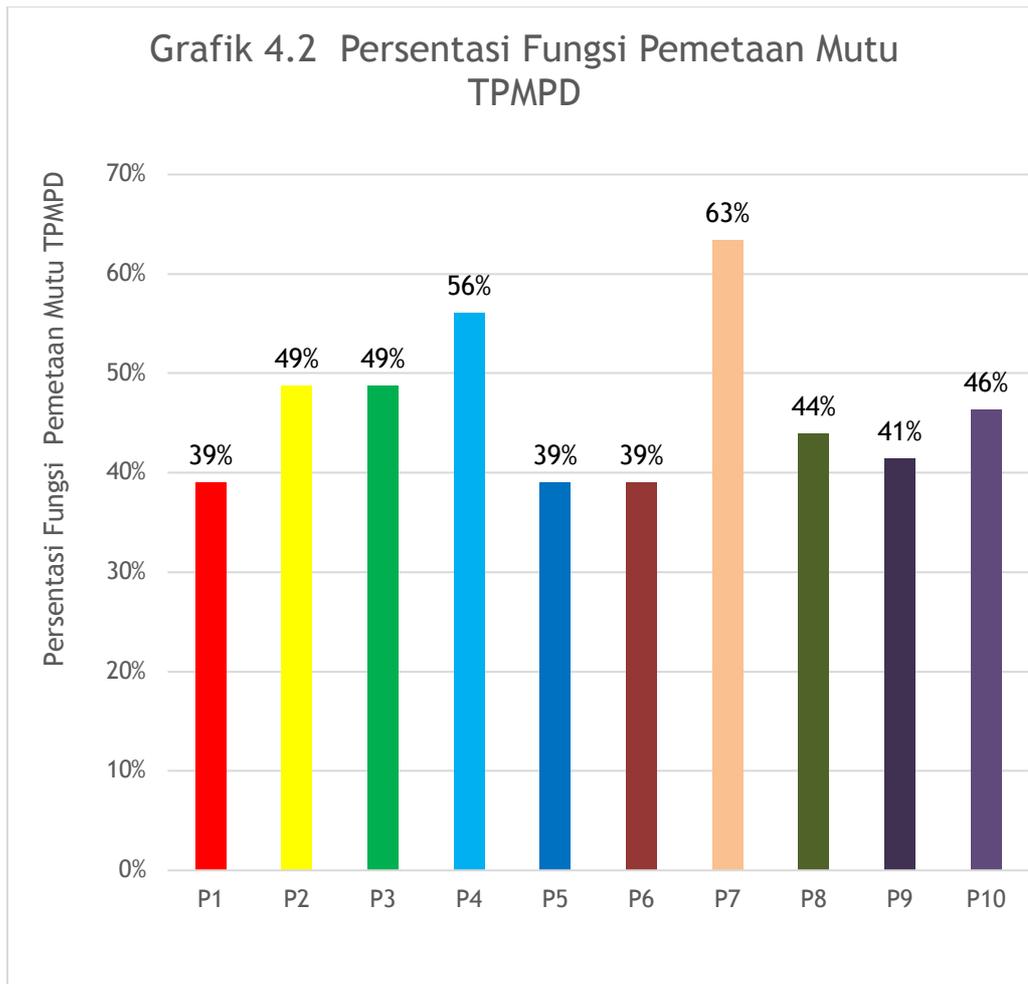
Beberapa asumsi kendala TPMPD yang tidak melaksanakan tupoksi tersebut antara lain padat nya kegiatan di kabupaten/kota, TPMPD lebih fokus pada kegiatan pendidikan di Kabupaten/kota masing-masing yang lebih bersifat umum dalam melayani janji kampanye dari bupati/walikota.

Rata-rata TPMPD di Jawa Barat yang memahami tugas pokok diperoleh hasil Sebanyak 45,6%

2. Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD

Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD meliputi melakukan koordinasi pengumpulan data mutu sekolah, mengolah dan menganalisis hasil akreditasi, laporan kepengawasan sekolah dan hasil pemetaan mutu dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan, melakukan uji petik terhadap mutu sekolah, menyusun laporan pemetaan mutu daerah, menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan, mendiseminasikan rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan, melaporkan hasil penyusunan rancangan kepada Dinas Pendidikan, melakukan pemantauan terhadap proses implementasi SPMI (termasuk pengimbasan), melakukan analisis permasalahan dalam pelaksanaan SPMI dan menyusun laporan evaluasi implementasi SPMI.

Terkait fungsi pemetaan mutu yang dilakukan oleh TPMPD di peroleh data sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.2 dibawah ini ;



Dari grafik 4.2 diatas dapat di jelaskan TPMPD yang telah melakukan koordinasi pengumpulan data mutu sekolah (P1) sebesar 39%, mengolah dan menganalisis hasil akreditasi (P2) 49%, membuat laporan kepengawasan sekolah dan hasil pemetaan mutu dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan (P3) 49%, melakukan uji petik terhadap mutu sekolah (P4) 56%, menyusun laporan pemetaan mutu daerah (P5) 39%, menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan (P6) 39%, mendiseminasikan rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan (P7) sebanyak 63%, melaporkan hasil penyusunan rancangan kepada Dinas Pendidikan (P8) sebanyak 44%, melakukan pemantauan terhadap proses implementasi SPMI (termasuk pengimbasan) (P9) sebanyak 41% dan yang telah melakukan analisis permasalahan

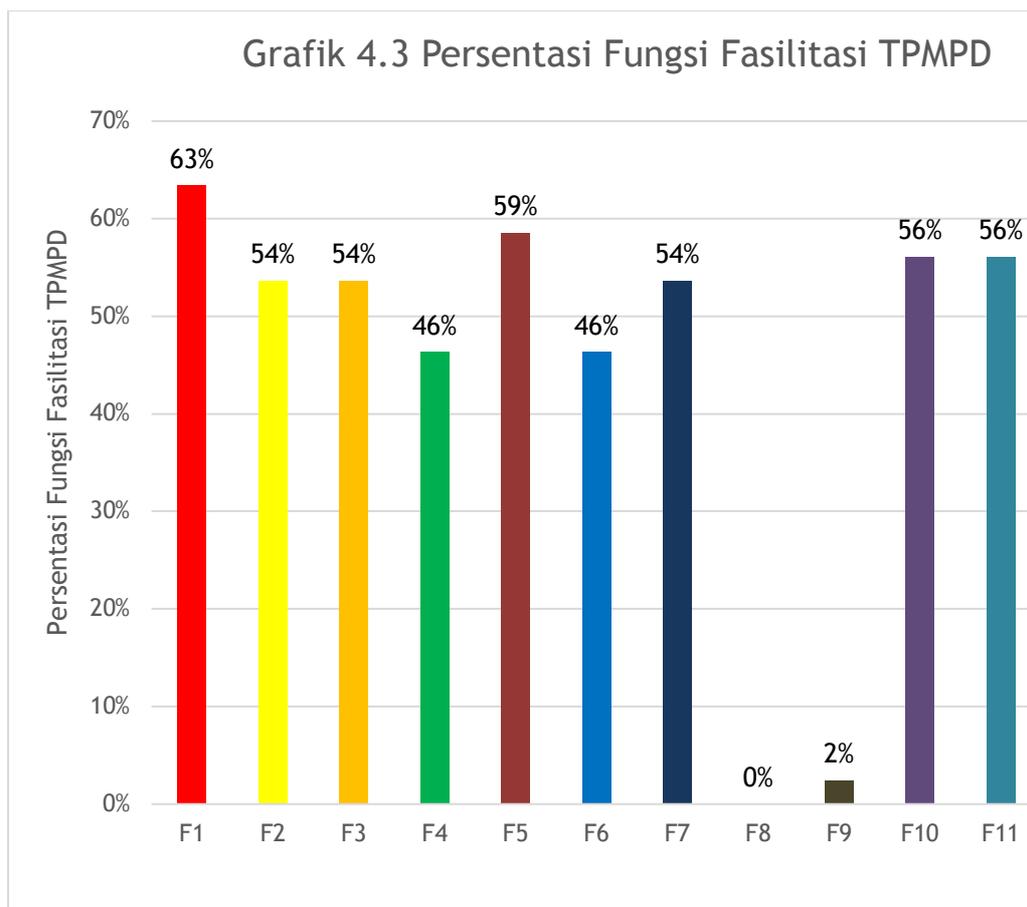
dalam pelaksanaan SPMI dan menyusun laporan evaluasi implementasi SPMI (P10) sebanyak 46%.

Rata-rata TPMPD di Jawa Barat yang melaksanakan fungsi pemetaan mutu Sebanyak 46,5%

3. Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD

Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD meliputi merancang pengembangan kapasitas pengawas sekolah dan sekolah dalam pelaksanaan SPMI, menyiapkan fasilitator dalam pengembangan kapasitas pengawas dan sekolah, menyiapkan dan mengkoordinasikan proses pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah, merancang implementasi pengimbasan SPMI ke seluruh sekolah di wilayah, menyusun laporan fasilitasi SPMI, mengembangkan inovasi dalam pencapaian 8 SNP, mendiseminasikan hasil inovasi kepada pemangku kepentingan, merancang pelaksanaan pengimbasan inovasi pencapaian 8 SNP, mengembangkan inovasi dalam membangun kemitraan antara sekolah dengan masyarakat, mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan mendiseminasikan hasil kemitraan.

Terkait fungsi fasilitasi yang telah dilakukan oleh TPMPD dapat ditunjukkan sebagaimana grafik 4.3 di bawah ini ;



Dari grafik 4.3 diatas dapat di jelaskan TPMPD yang telah merancang pengembangan kapasitas pengawas sekolah dan sekolah dalam pelaksanaan SPMI (F1) 63%, menyiapkan fasilitator dalam pengembangan kapasitas pengawas dan sekolah (F2) 54%, menyiapkan dan mengkoordinasikan proses pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah (F3) 54%, merancang implementasi pengimbasan SPMI ke seluruh sekolah di wilayah (F4) 46%, menyusun laporan fasilitasi SPMI (F5) 59%, mengembangkan inovasi dalam pencapaian 8 SNP (F6) 46%, mendiseminasikan hasil inovasi kepada pemangku kepentingan (F7) 54%, merancang melaksanakan pengimbasan inovasi pencapaian 8 SNP (F8) 0%, mengembangkan inovasi dalam membangun kemitraan antara sekolah dengan masyarakat (F9) sebesar 2%, mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat (F10) sebesar 56% dan mendiseminasikan hasil kemitraan (F11) 56%.

Rata-rata TPMPD di Jawa Barat yang melaksanakan fungsi fasilitasi mutu Sebanyak 44,5%.

C. Pembahasan

Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain untuk mendapatkan gambaran kondisi objektif profil TPMPD dilihat dari aspek Latar belakang pendidikan dan jabatan TPMPD serta konsistensi TPMPD dalam mengikuti IN-1 dan IN-2, kondisi objektif pemahaman TPMPD terkait tugas pokok TPMPD, fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD serta fungsi fasilitasi oleh TPMPD maka, berdasarkan hasil analisis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Profil TPMPD

Untuk gambaran profil TPMPD dikaji terkait dengan latar belakang pendidikan, Jabatan TPMPD serta konsistensi kehadiran TPMPD dalam mengikuti Bimtek TPMPD IN-1 dan IN-2, pada aspek latar belakang pendidikan diperoleh informasi bahwa pengurus TPMPD dengan jenjang S2 menunjukkan jumlah mayoritas sedangkan yang paling sedikit jenjang kualifikasi D3. Dengan jumlah kualifikasi pendidikan S2 sebagai pengurus TPMPD di asumsikan tingkat pemahaman pengurus terhadap tugas pokok dan fungsi TPMPD di anggap mumpuni, hal ini juga dapat di asumsikan bisa mempengaruhi terhadap pengurus yang berkualifikasi D3 dan SMA/SMK yang merupakan jumlah paling kecil.

Dari aspek jabatan diperoleh informasi bahwa jumlah pengurus TPMPD pada kegiatan Bimtek IN-1 dan IN-2 pengurus TPMPD yang berasal dari unsur dewan pendidikan menunjukkan jumlah paling sedikit sebesar 1%, sedangkan yang paling banyak mengikuti Bimtek IN-1 dan IN-2 dari unsur pengawas sebesar 61% di IN-1 dan 62 % di IN-2.

Hal ini dapat di asumsikan dikarenakan informasi yang diterima oleh pada saat Bimtek hanya diterima sebagai besar oleh unsur pengawas, sehingga dapat diduga TPMPD tidak dapat mengeksekusi dan mengimplementasikan materi-materi yang di terima dan diperoleh pada saat Bimtek IN-1 dan IN-2 dan akan terjadi komplik kepentingan antara fungsi pengawas sebagai pengurus TPMPD dan fungsi pengawas sebagai pendamping dan Pembina

satuan pendidikan, di lain pihak tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang di rumuskan oleh Dinas Pendidikan, Bappeda dan pemerintah Daerah mengingat materi yang di sajikan pada bimtek merupakan program peningkatan mutu di tiap kabupaten kota.

Adapun terkait dengan konsistensi tingkat kehadiran pengurus TPMPD pada saat kegiatan Bimtek diperoleh informasi bahwa dari 41 TPMPD yang ada di provinsi Jawa Barat hanya 39% (16 TPMPD) mengirimkan orang yang sama sebagai peserta Bimtek TPMPD pada kegiatan IN-1 dan IN-2 atau sebesar 22% (9 TPMPD), hanya sebagian kecil hadir secara konsisten. Sedangkan Terdapat 2% (1 TPMPD) yang mengirimkan peserta yang berbeda atau berlainan orang pada saat kegiatan Bimtek IN-1 dan IN-2. Dari Informasi tersebut di asumsikan sebagian besar TPMPD mengikuti kegiatan Bimtek dengan orang yang sama sehingga informasi yang diperoleh peserta Bimtek relative dapat tersampaikan sedangkan hanya sebagian kecil saja yang mengirimkan orang yang berbeda-beda, oleh karena hal tersebut di asumsikan informasi terkait materi tidak utuh atau tidak dipahami secara menyeluruh.

2. Tugas Pokok TPMPD

Rata-rata TPMPD di Jawa Barat yang memahami tugas pokok diperoleh hasil Sebanyak 45,6%, Komponen yang paling tinggi adalah melakukan pemetaan mutu pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan (T2) sebesar 51% dan komponen yang terendah adalah menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah (T3) sebesar 37%.

3. Fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD

Untuk fungsi pemetaan dapat digambarkan TPMPD diperoleh hasil rata-rata yang melaksanakan fungsi pemetaan mutu Sebanyak 46,5%, sedangkan komponen yang paling rendah adalah terdiri dari komponen komponen, melakukan koordinasi pengumpulan data mutu sekolah (P1) sebesar 39%, menyusun laporan pemetaan mutu daerah (P5) 39%, menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan (P6) 39%, sedangkan yang paling tinggi adalah komponen mendiseminasikan rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan (P7) sebanyak 63%.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa di asumsikan bahwa TPMPD telah melaksanakan desiminasi rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan, sehingga dapat diduga satuan pendidikan telah mengetahui terkait dengan program peningkatan mutu pendidikan namun TPMPD masih belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam kontek Koordinasi dan pengumpulan data, menyusun laporan pemetaan mutu daerah serta menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan.

4. Fungsi fasilitasi oleh TPMPD

Fungsi fasilitasi oleh TPMPD diperoleh hasil rata-rata sebanyak 44,5%, hal ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi oleh TPMPD pada kegiatan penjaminan mutu pendidikan termasuk katagori kurang.

Pada fungsi fasilitasi oleh TPMPD diperoleh informasi bahwa komponen yang paling tinggi terdapat pada komponen merancang pengembangan kapasitas pengawas sekolah dan sekolah dalam pelaksanaan SPMI (F1) 63%, sedangkan komponen yang paling kecil adalah komponen merancang melaksanakan pengimbasan inovasi pencapaian 8 SNP (F8) 0%, mengembangkan inovasi dalam membangun kemitraan antara sekolah dengan masyarakat (F9) 2%. Berdasarkan data tersebut dapat di asumsikan bahwa TPMPD masih belum optimal

dalam melakukan fasilitasi TPMP terhadap satuan pendidikan, apalagi komponen merancang pelaksanaan pengimbasan dan inovasi menunjukkan hasil yang sangat kecil padahal aspek ini merupakan aspek yang vital dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, sehingga perlu perhatian khusus dari stakeholder terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kajian deskriptif Tugas pokok dan fungsi TPMPD dilihat dari Profil dengan katagori Baik, Tugas pokok, Fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi secara umum menunjukkan hasil 45,03% dengan katagori kurang, adapun secara khusus hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu : Profil pengurus TPMPD mayoritas berkualifikasi S2 sebanyak 75% dengan katagori Baik, Jabatan pengurus TPMPD mayoritas pengawas sebanyak 61,5% dengan katagori Cukup, Tingkat konsistensi pengurus TPMPD dalam mengikuti Bimtek sebanyak 37,5% dengan katagori kurang. Pemahaman tugas pokok dan fungsi TPMPD sebanyak 45,6% dengan katagori Kurang, untuk fungsi pemetaan mutu oleh TPMPD diperoleh hasil sebanyak 46% dengan katagori Kurang serta untuk fungsi Fasilitasi mutu pendidikan oleh TPMPD diperoleh hasil sebanyak 44,5% dengan katagori Kurang.

B. Rekomendasi

Secara Umum dari hasil analisis perlu di perjelas kriteria pengurus TPMPD, mengingat pengawas mendominasi kepengurusan TPMPD, seharusnya merujuk ke juklak dan juknis yang telah ditetapkan oleh kemendikbud dimana unsur pejabat lebih di dominasi oleh Pejabat, karena pengawas berfungsi sebagai fasilitator daerah.

Secara khusus beberapa rekomendasi penelitian ini terkait dengan pemahaman untuk organisasi TPMPD sebagai berikut :

1. Perlu pejabat dinas kabupaten kota sebagai pengurus TPMPD mengingat tugasnya sebagai perancang, Pembina dan pengelolaan dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan.
2. Perlu diperjelas aturan peserta bimtek TPMPD agar pengurus secara konsisten mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada IN-1 dan IN-2.
3. Perlu ditingkatkan keterampilan menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah
4. Perlu dilakukan koordinasi pengumpulan data mutu sekolah
5. Perlu ditingkatkan mengolah dan menganalisis hasil akreditasi
6. Perlu menyusun laporan pemetaan mutu daerah
7. Perlu menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan
8. Perlu mendiseminasikan rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan
9. Perlu ditingkatkan keterampilan dalam merancang pelaksanaan pengimbasan inovasi pencapaian 8 SNP
10. Perlu mengembangkan inovasi dalam membangun kemitraan antara sekolah dengan masyarakat

Sedangkan beberapa rekomendasi penelitian ini untuk LPMP Jawa Barat sebagai berikut :

1. LPMP Jawa Barat perlu merancang program Bimtek dan strategi yang sesuai dengan peruntukannya sehingga hasilnya lebih komprehensif.
2. Melakukan sinkronisasi kegiatan pendidikan di daerah dengan kegiatan penjaminan mutu di pusat sehingga lebih memahami dalam konteks implementasi PMP di kabupaten/kota.

3. Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang TPMPD yang lebih spesifik terkait dengan jabatan, kualifikasi pendidikan pengurus TPMPD, tugas pokok, fungsi pemetaan mutu dan fungsi fasilitasi TPMPD.
4. Perlunya TPMPD berkreasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten kota masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Jabatan dalam organisasi*, Manullang (1981:28), CV. Multimedia Elekmedia,
Jakarta tahun 2018
- Deskripsi Jabatan dan Spesifikasi Jabatan.*, Moekijat (1998:98), Surabaya, tahun 1998.
- Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM)*, Alwi (2001:108), PT. Cakrabuana publishing, Jakarta, Tahun 2001
- Metode-metode Analisis Jabatan*, Dessler (1997:93), dusseldorf germany, Tahun 1997
- Planning, position Analisis, job information*, Mathis dan Jackson (2006:200),
CV. Galamedia publishing, Tahun 2006.
- Prinsip-prinsip Analisis Jabatan*, Moekijat (1999:18), Surabaya, Tahun 1999
- Proses Analisis Jabatan*, Hasibuan (2005:30). Medan, Tahun 2005
- Position analisis and user position analisis Job.*, Strauss, George (1991:9), USA,
Washington DC., tahun 1991.
- Sistematika pemetaan Jabatan dalam organisasi dan perkantoran*, Handoko (2001:32),
Jogjakarta, Prima edukasi, 2001.
- Strategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, design, dan redesign jabatan, dan perencanaan SDM*. Jakarta, Nawawi (2005:104),
Tahun 2005.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM)*, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016, Jakarta , Tahun 2016
- Tugas Pokok dan Fungsi TPMPD Daerah*, Permendikbud No.28 tahun 2016. Jakarta,
Tahun 2016
- Jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan, uraian pekerjaan*, Permendikbud No.28 tahun 2019, Jakarta,
Tahun 2019
- Job specification and planning, organizing, actuating, controlling.*, Rivai (2004:126),
Jakarta tahun 2004
- Karakteristik personel, penempatan dan seleksi SDM.*, Sihotang, (2007:67)., Jakarta
Tahun 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Lengkap :
2. NIP/NUPTK :
3. Tanggal lahir/ Umur :
4. Jenis Kelamin : laki-laki/ perempuan *)
5. Pendidikan Terakhir : a. D4/S1/S2/S3
6. Pangkat/Golongan :
7. Jabatan :
8. Jabatan dalam TPMPD:
9. Email/HP :
10. Instansi :
11. Kabupaten/Kota :
12. Tanggal Pengisian :

.....2019
Nama

NIP.

INSTRUMEN PENELITIAN

KAJIAN DESKRIPSI TUPOKSI DAN WEWENANG TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH (TPMPD) DI WILAYAH JAWA BARAT

A. Tugas Pokok TPMPD

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Saudara melakukan Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI		
2.	Saudara melakukan pemetaan mutu pendidikan dalam pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan		
3.	Saudara menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah kepada pimpinan wilayah masing-masing?		

B. Fungsi Pemetaan Mutu oleh TPMPD

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Melakukan Mengkoordinasi pengumpulan data mutu sekolah		
2.	Mengolah dan menganalisis hasil akreditasi, laporan kepengawasan sekolah dan hasil pemetaan mutu dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan		
3.	Melakukan uji petik terhadap mutu sekolah		
4.	Menyusun laporan pemetaan mutu daerah		
5.	Menyusun rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan		
6.	Mendiseminasikan rancangan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan		
7.	Melaporkan hasil penyusunan rancangan kepada Dinas Pendidikan		
8.	Melakukan pemantauan terhadap proses implementasi SPMI (termasuk pengimbasan)		
9.	Melakukan analisis permasalahan dalam pelaksanaan SPMI		
10.	Menyusun laporan evaluasi implementasi SPMI		

C. Fungsi Fasilitasi oleh TPMPD

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Merancang pengembangan kapasitas pengawas sekolah dan sekolah dalam pelaksanaan SPMI		
2.	Menyiapkan fasilitator dalam pengembangan kapasitas pengawas dan sekolah		
3.	Menyiapkan dan mengkoordinasikan proses pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah		
4.	Merancang implementasi pengimbasan SPMI ke seluruh sekolah di wilayah.		
5.	Menyusun laporan fasilitasi SPMI		
6.	Mengembangkan inovasi dalam pencapaian 8 SNP		
7.	Mendiseminasikan hasil inovasi kepada pemangku kepentingan		
8.	Merancang melaksanakan pengimbasan inovasi pencapaian 8 SNP		
9.	Mengembangkan inovasi dalam membangun kemitraan antara sekolah dengan masyarakat.		
10.	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat		
11.	Mendiseminasikan hasil kemitraan.		